

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat dikenal sebagai *The Only Super Power* yang cenderung menggunakan hard power sebagai instrument utama diplomasinya. Amerika Serikat memiliki segala unsur baik potensi ekonomi dan kekuatan militer, yang memungkinkannya untuk menghasilkan kekuatan sehingga mampu mempengaruhi peta geopolitik internasional (Britannica, 2014). Negara ini kemudian kerap memosisikan dirinya sebagai “*Polisi Dunia*” dengan selalu melibatkan diri ke dalam konflik – konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk konflik Internal Suriah yang mulai bergolak sejak tahun 2011 silam.

Konflik berawal ketika masyarakat sipil Suriah melaksanakan aksi demonstrasi menentang pemerintahan rezim Bashar Al Assad. Demonstran mengkritik adanya stagnasi politik dan menuntut pergantian rezim ke arah yang demokratis (White House, 2013). Protes para demonstran tersebut ditanggapi dengan cara kekerasan oleh Pemerintah Suriah melalui penculikan, penyiksaan dan pembunuhan, bahkan pada taraf yang lebih jauh, Pemerintah Suriah pada 21 Agustus 2013 silam menggunakan senjata kimia berbahaya jenis gas *sarin* untuk memadamkan aksi demonstrasi di luar wilayah Damaskus. Akibatnya, lebih dari 1.400 korban jiwa berjatuhan dari masyarakat sipil Suriah terutama lansia, wanita dan anak – anak (Public Broadcasting Service, 2013). Konflik bersenjata antara

pemerintah, kelompok pro pemerintah maupun oposisi, kemudian menjadi hal yang tak terhindarkan di Suriah.

Untuk merespon meningkatnya eskalasi konflik internal yang terjadi di Suriah dan adanya indikasi penggunaan senjata kimia berbahaya oleh rezim Assad, pada pertengahan 2013 lalu, Amerika Serikat melibatkan diri dalam pergolakan internal Suriah (Islam Times, 2014). Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik internal Suriah ini diklaim dilakukan atas dasar kemanusiaan untuk menghentikan tindakan pemerintah Suriah yang telah menggunakan senjata kimia berbahaya hingga menjatuhkan korban jiwa dalam jumlah yang massiv dari berbagai pihak terutama masyarakat sipil (BBC, 2013). Akibat adanya penggunaan gas kimia berbahaya tersebut, lebih dari 3000 orang warga sipil tercatat menderita *neurotoxic symptoms*. Sejak 2013 silam, Dewan Keamanan PBB menyatakan bahwa konflik berkepanjangan di Suriah telah menyebabkan lebih dari 70.000 masyarakat tewas terbunuh dan ribuan lainnya kehilangan sanak keluarga, harta dan tempat tinggal sehingga terpaksa mengungsi ke beberapa negara tetangga terdekat (Public Broadcasting Service, 2013).

Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama, menyatakan bahwa Pemerintah Suriah dibawah komando Presiden Bashar Al Assad telah mencederai hukum internasional karena telah menggunakan sarin gas dalam memadamkan aksi demonstrasi masyarakat sipil. Penggunaan senjata kimia berbahaya tersebut dianggap telah melewati ‘garis merah’ dan Amerika Serikat perlu mengambil sikap yang tegas dalam merespon bahaya terhadap kemanusiaan tersebut. Presiden Barack Obama kemudian mengagagas rencana untuk melakukan invasi militer terhadap Suriah. Amerika Serikat lalu menerjunkan dan mengoperasikan kapal –

kapal induknya yang dilengkapi dengan peralatan tempur canggih dan berteknologi tinggi di sekitar kawasan perairan mediterania yang tak jauh dari perbatasan laut Suriah (Kompasiana, 2013). Sejak dioperasikan di kawasan perairan Suriah, kapal – kapal tersebut selalu berada dalam posisi siap siaga untuk membombardir Suriah kapanpun Presiden Barack Obama memerintahkan armada militernya untuk melakukan tindakan tersebut (Politic Geography, 2013).

Namun dalam perkembangannya, pada september 2013 silam, sikap Amerika Serikat terhadap Suriah cenderung berubah seiring Amerika Serikat memutuskan untuk menyepakati opsi diplomatik yang ditawarkan oleh Rusia yang berdiri di pihak Suriah (VoA , 2013). Dengan dicapainya opsi diplomatik tersebut, Amerika Serikat sepakat untuk menarik armada militernya dari Suriah seiring dengan kesepakatan Suriah yang bersedia menyerahkan seluruh pasokan senjata kimianya di bawah pengawasan internasional. Akibatnya, seluruh armada militer Amerika Serikat seperti kapal induk USS Nimitz, USS Graveley, USS Harry S Truman telah diperintahkan untuk kembali ke pangkalannya di West Coast, Amerika Serikat (Detik News, 2013).

Keputusan Amerika Serikat yang mengubah strategi diplomasinya dari *hard power* menjadi *soft power* tersebut terbilang cukup kontradiktif dengan motif awal yang disampaikan Amerika Serikat pada dunia internasional, dimana Amerika Serikat mengklaim upaya intervensi militer yang akan dilakukannya diambil untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang tengah terjadi di Suriah. Hal tersebut kontradiktif karena pasca dilakukan perubahan strategi diplomasi kearah *soft power* tersebut, krisis kemanusiaan di Suriah masih terus berlangsung hingga saat ini bahkan jauh lebih parah daripada sebelumnya. Perubahan strategi

diplomasi Amerika Serikat dilakukan sementara problem kemanusiaan di Suriah belum berakhir. Yang berarti, motif awal intervensi Amerika Serikat yang dilakukan dengan mengatasnamakan kemanusiaan tak tercapai. Karena jika ditelisik lebih mendalam, krisis kemanusiaan di Suriah tak semata – mata disebabkan oleh adanya penggunaan senjata kimia berbahaya oleh Pemerintah Suriah. Krisis kemanusiaan di Suriah jauh lebih parah terjadi karena adanya konflik berkepanjangan antara pemerintah, kubu pendukung pemerintah, kubu oposisi dan adanya intervensi aktor eksternal. Adanya keterlibatan multi aktor di Suriah telah menyebabkan konflik berubah kearah *Proxy War*, yang pada akhirnya menjatuhkan korban di pihak masyarakat sipil (New Yorker News, 2013).

Konflik bersenjata di Suriah masih terus memanas dan terus menerus menjatuhkan korban jiwa. Eskalasi konflik meningkat, mass killing terus terjadi dan seiring dengan itu, angka pertumbuhan kubu – kubu oposisi dan kelompok – kelompok baru pendukung pemerintah juga terus meningkat, menyebabkan munculnya semakin banyak aktor yang terlibat dalam konflik tersebut. Beberapa kubu – kubu utama di Suriah yakni *Syrian Army*, *Free Syrian Army*, *Islamic Front*, *Jabhat Al Nusra* yang terhubung dengan *Al Qaeda*, *Hizbullah*, Militan Kurdi, Militan Kristiani serta *Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL)*. Dalam perkembangannya, beberapa kubu oposisi memutuskan bersatu dan tergabung kedalam *National Coalition for Syrian Revolutionary and Opposition Forces* (Deutsche Welle, 2014). Kubu – kubu tersebut masing – masing menguasai daerah teritorial tertentu di Suriah. Konflik berkepanjangan di Suriah juga menyebabkan hadirnya berbagai pejuang eksternal yang sebagian besar diantaranya merupakan kelompok radikal islam.

Keadaan konflik yang terus memanas tersebut menyebabkan tingginya angka pengungsi dan korban jiwa dari berbagai golongan. Tak hanya itu, keadaan diperparah dengan adanya penggunaan senjata konvensional seperti ranjau maupun cluster bombs oleh pihak – pihak yang bertikai. Menurut hukum internasional, penggunaan senjata jenis konvensional tersebut telah dilarang digunakan dalam segala kondisi akibat adanya rasa sakit dan kerugian berlebihan yang ditimbulkan dari jenis senjata tersebut. Pihak - pihak yang bertikai bahkan tak jarang menggunakan *human shields* selama menjalankan operasi militernya untuk melindungi pasukan ketika menyerang suatu wilayah (ABC News, 2014). Kekerasan juga menimpa anak – anak usia dini yang secara terbuka bahkan di tembak mati di jalanan maupun di rumah mereka oleh kubu – kubu pendukung pemerintah, oposisi maupun kelompok radikal. Sekolah – sekolah telah beralih fungsi menjadi barak – barak militer bagi pejuang Suriah (US Department of State, 2014).

Sederet keadaan – keadaan yang muncul ke permukaan tersebut menjadi sebuah anomali besar jika dikolerasikan dengan keputusan Amerika Serikat yang mengubah strategi diplomasinya dalam mengatasi konflik internal Suriah. Di tengah krisis kemanusiaan yang tak teratasi tersebut, Amerika Serikat justru mengubah strategi diplomasinya dari *hard power* menjadi *soft power*. Apa yang melatarbelakangi kebijakan Amerika Serikat tersebut? Mengapa di tengah meningkatnya eskalasi konflik, meningkatnya angka kekerasan di Suriah, semakin parahnya krisis kemanusiaan dan banyaknya ancaman terorisme seiring kemunculan kubu – kubu radikal oposisi maupun pendukung pemerintah Bashar Al Assad, Amerika Serikat justru membatalkan kebijakannya untuk melakukan

invasi militer dan lebih mengedepankan opsi diplomatik yang dimotori oleh Rusia? Apabila Amerika Serikat berupaya untuk mengatasi konflik secara menyeluruh, mengapa Amerika Serikat membatalkan wacana invasi militernya? Di tengah fenomena terror yang terus menunjukkan peningkatan, Amerika Serikat biasanya cenderung mengedepankan penggunaan *hard power* dengan melakukan serangan atau invasi militer. Perubahan strategi diplomasi yang dilakukan Amerika Serikat dalam menangani konflik berkepanjangan yang Suriah ini terkesan begitu berbeda dengan strategi *hard power* yang cenderung digunakan Amerika Serikat terhadap negara – negara timur tengah lainnya yang mengalami konflik serupa, yakni seperti halnya yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Irak maupun Afghanistan.

Selama ini dengan menggunakan strategi *hard power*, Amerika Serikat secara efektif mampu menjaga stabilitas keamanan dan mampu menetralkan perilaku kelompok – kelompok yang beresiko mengancam maupun merugikan Amerika Serikat. Efektifnya penggunaan *hard power* oleh Amerika Serikat tersebut dibuktikan melalui suksesnya Operasi Pembebasan Irak pada tahun 2003 silam dimana Amerika Serikat bersama pasukan koalisi melakukan invasi militer terhadap Irak karena adanya indikasi pelanggaran HAM berat dan pembunuhan oleh Pemerintah Irak terhadap 148 orang di daerah Dujail dan kepemilikan atas senjata pemusnah massal (Moslem Info, 2013). Melalui invasi militer tersebut, Amerika Serikat berhasil mengakhiri pemerintahan otoriter Saddam Hussein dan meniupkan angin demokrasi di Irak. Namun dalam kasus Suriah ini, Amerika Serikat justru mengganti strategi diplomasi *hard power*-nya dan justru lebih mengedepankan strategi diplomasi *soft power* dengan mencapai kesepakatan

melalui perundingan di atas meja negosiasi dengan Rusia yang notabeneanya merupakan sekutu terdekat rezim pemerintah Suriah. Negosiasi antara Amerika Serikat dan Rusia bahkan semakin intens dengan dilakukannya sejumlah pertemuan dalam membahas upaya perlucutan senjata kimia Suriah selepas Amerika Serikat menarik armada militernya dari perairan Suriah (Sindo News , 2013).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul rumusan masalah yaitu, “Mengapa Amerika Serikat mengubah strategi diplomasinya dari *hard power* menjadi *soft power* dalam konflik internal Suriah pada tahun 2013 – 2014?”

C. Tujuan Penelitian

Kegiatan penulisan ini dimaksudkan untuk :

1. Menjelaskan alasan atau motif di balik adanya perubahan strategi diplomasi yang dilakukan Amerika Serikat dalam Konflik Internal Suriah dimana dalam hal tersebut Amerika Serikat mengubah strategi diplomasinya dari *hard power* menjadi *soft power*.
2. Penulisan ini juga ditujukan untuk melengkapi tugas akhir penulis yang merupakan syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Landasan Teoritik

1. Konsep Strategi dan Taktik

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi juga dimengerti sebagai perencanaan tingkat tinggi untuk mencapai sebuah atau beberapa tujuan di bawah suatu kondisi yang tak menentu (Rumelt, 2011). Strategi terdiri atas susunan koordinasi tim kerja, tema, identifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan maupun pelaksanaan aktivitas, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat dimana taktik adalah bagian dari sebuah strategi. Taktik merupakan langkah – langkah dalam menjalankan strategi. Secara definitive, taktik dimaknai sebagai sebuah tindakan implementasi konseptual atas sebuah aksi yang spesifik (Business Dictionary, 2010).

Amerika Serikat pada awalnya menjalankan strategi diplomasi *hard power*, yang biasa diterapkannya pada negara timur tengah lainnya yang sebelumnya pernah mengalami konflik internal serupa yakni dengan melakukan invasi militer. Amerika Serikat berwacana untuk melakukan invasi militer dengan mengoperasikan kapal – kapal induknya yang dilengkapi dengan pasukan bersenjata lengkap di sekitar perairan Mediterania. Kapal – kapal induk tersebut telah siap untuk membombardir Suriah kapanpun Presiden Barack Obama memerintahkan. Dalam hal ini, keputusan untuk melakukan invasi militer sepenuhnya berada di tangan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, sebagai

panglima militer tertinggi. Namun dalam perkembangannya, Amerika Serikat melakukan perubahan strategi diplomasi ke arah yang lebih *soft* dengan membatalkan invasi militernya dan memilih melakukan diplomasi di atas meja perundingan atas prakarsa Rusia yang berada di pihak Suriah.

2. Konsep *Hard Power*

Hard Power di mengerti sebagai penggunaan kekuatan militer, fisik maupun ekonomi untuk mempengaruhi tindakan, kebijakan dan interest kubu politik yang berbeda dalam terms internasional. *Hard Power* dikembangkan dalam bentuk kekuatan koersif, penggunaan kekerasan, ancaman penggunaan kekerasan ataupun kekuatan militer / fisik maupun sanksi ekonomi (Kementerian Pertahanan, 2014). *Hard power* kerap kali dilakukan dengan tindakan yang ofensif dan agresif dan akan menjadi sangat efektif ketika tindakan ofensif tersebut ditujukan kepada political unit lain yang lebih lemah dari segi militer maupun ekonomi (Nye, 2003).

Terlepas dari definisi tersebut, *power* diklasifikasi menjadi dua golongan utama yakni *hard power* dan *soft power*. Aktor internasional pada umumnya cenderung menggunakan *hard power* apabila upaya *soft power* menempuh kegagalan, dalam artian, *hard power* digunakan sebagai *final means* (Weekly Standard, 2013). Terdapat tiga unsur utama yang selalu melekat pada power yakni *force, influence, dan authority* (Consilium Europe, 2013).

Joseph Nye menyebutkan penggunaan istilah *stick* dan *carrot* dalam menggambarkan konsep *hard power* maupun *soft power*. *Stick* dan *carrot* digunakan sebagai sebuah perumpamaan *power* dimana suatu aktor menggunakan kedua hal tersebut agar aktor lain mengikuti keinginan sang aktor utama. Aktor A

akan mengedepankan pendekatan yang lebih lembut apabila aktor B mengikuti keinginan aktor A. Contoh nyatanya yakni berupa pengurangan hambatan dagang, menawarkan pembentukan aliansi maupun memberikan jaminan perlindungan keamanan. Tindakan *rewards* dalam bentuk berbagai kebijakan melalui pendekatan yang lebih soft tersebut dikenal dengan istilah *carrot*. Sedangkan istilah *stick* dikenal sebagai pendekatan hard power dengan penggunaan kebijakan – kebijakan diplomasi koersif. Dalam hal ini, aktor utama berupaya memberikan *punishment* kepada aktor lain karena tak mengikuti keinginan aktor utama. Contoh kebijakan nyata penggunaan sticks yakni sanksi ekonomi maupun invasi militer (Nye, 2004).

Dalam hal ini, *hard power* yang dimaksudkan berada dalam konteks yang sama dengan definisi *hard power* pada umumnya, yakni penggunaan pendekatan militer yang koersif untuk mencapai suatu tujuan. Pada awalnya Amerika Serikat melibatkan diri dalam konflik internal Suriah dengan menggunakan strategi diplomasi *hard power* melalui adanya kebijakan untuk melakukan invasi militer di Suriah. Presiden Barrack Obama mengawali kebijakan invasi militer tersebut dengan menerjunkan armada – armada militernya dan mengoperasikan kapal – kapal induk militer berkapasitas teknologi tempur canggih di sekitar perairan mediterania yang mendekati wilayah perairan Suriah.

Kapal – kapal tempur tersebut selalu berada dalam posisi siap siaga untuk menggempur dan menyerang Suriah kapanpun Presiden Barrack Obama memerintahkan. Amerika Serikat dalam hal ini diindikasikan menggunakan jenis *stick* melalui strategi diplomasi *hard power* dalam rangka memberi *punishment* terhadap Suriah, karena menurut Amerika Serikat, Pemerintah Suriah telah

menggunakan senjata kimia berbahaya hingga melewati 'red line' untuk memadamkan aksi perlawanan di Suriah hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa secara massal dari berbagai golongan terutama warga sipil. Selain sebagai *punishment*, penggunaan strategi diplomasi hard power oleh Amerika Serikat dilakukan sebagai bentuk ancaman untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan Pemerintah Suriah sehingga pada akhirnya, dengan adanya penggunaan pendekatan koersif melalui ancaman invasi militer yang akan dijalankan oleh Amerika Serikat, Pemerintah Suriah akan merubah arah kebijakannya menjadi sejalan dengan keinginan Amerika Serikat.

3. Konsep *Soft Power*

Konsep *soft power* dikembangkan oleh Joseph Nye pada akhir tahun 1980-an untuk mendeskripsikan kemampuan untuk mengajak ataupun menarik dengan menggunakan pendekatan kooptasi yang lembut daripada mengedepankan penggunaan kekerasan yang koersif ataupun pemberian financial sebagai tindakan persuasif. Dalam bukunya, *Bound to Lead: The Changing Nature of American Power*, Joseph Nye menyatakan: "suatu negara dapat meraih apa yang diinginkannya dari negara lain dengan menggunakan *soft power* melalui cara mengajak negara lain untuk menginginkan hal yang sama dengan yang negara tersebut inginkan, dimana hal tersebut kontras dengan penggunaan *hard power* melalui penggunaan kekerasan ataupun perintah agar suatu negara mengikuti kehendak negara tersebut" (Foreign Policy, 2006).

Berbeda dengan *hard power*, penggunaan *soft power* lebih mengarah kepada tindakan penarikan ataupun pendekatan secara positif dan persuasif untuk mencapai tujuan dari kebijakan luar negeri suatu negara. *Soft Power* juga dapat

digambarkan dengan penggunaan istilah *carrot* yang dimana *hard power* digambarkan dengan istilah *stick*. Jika diibaratkan, *hard power* lebih kearah tindakan ‘mendorong’ negara lain sedangkan *soft power* adalah tindakan ‘menarik’ dan ‘mengajak’ negara lain (Foreign Affairs, 2011). Joseph Nye menjelaskan bahwa tindakan seduktif melalui *soft power* dapat menjadi lebih efektif daripada penggunaan pendekatan koersif melalui *hard power* (S.Nye, 2011). Walaupun pada banyak kasus, kedua jenis *power* tersebut akan lebih efektif apabila dikolaborasikan secara cerdas oleh aktor penggunanya.

Dalam kasus ini, dapat dispesifikasikan bahwa *soft power* dimaknai sebagai tindakan Amerika Serikat yang lebih mengedepankan kesepakatan diatas meja perundingan dengan Suriah. Amerika Serikat mengubah strategi diplomasinya dari *hard power* menjadi *soft power* seiring Amerika Serikat mencapai kata sepakat dalam negosiasi melalui jalur diplomasi damai dengan Suriah yang diprakarsai oleh Rusia. Amerika Serikat dalam negosiasi terkait sepakat untuk membatalkan invasi militernya terhadap Suriah apabila Suriah bersedia menyerahkan seluruh pasokan senjata kimianya di bawah pengawasan internasional hingga pertengahan 2014.

Dengan mengubah strategi diplomasinya kearah *soft power*, Amerika Serikat membatalkan penggunaan pendekatan militer untuk mengatasi konflik berkepanjangan yang terjadi di Suriah namun lebih mengedepankan diplomasi damai melalui perundingan dan pencapaian kesepakatan melalui negosiasi. Pendekatan koersif pada awalnya dilakukan Amerika Serikat dalam menangani konflik Suriah, namun dalam perkembangannya, Amerika Serikat melakukan

perubahan strategi diplomasi kearah yang lebih persuasif melalui diplomasi damai dengan pihak Suriah.

4. Teori Model Aktor Rasional

Teori Model Aktor Rasional berasumsi bahwa negara adalah satu - satunya aktor dalam politik dunia. Negara-negara mempunyai tujuan yang identik dan pembuatan kebijakan merupakan pilihan yang rasional. Model ini mempunyai prinsip “*maximize their gains, minimize their loses*” (Graham T.Allison, 1963). Teori ini menekankan bagaimana negara sebagai aktor tunggal dalam proses pengambilan keputusan, melakukan kalkulasi untung rugi terhadap setiap opsi/alternatif tindakan yang akan dipilih dan dilakukannya. Apabila negara dihadapkan pada dua opsi dan negara diposisikan harus memilih salah satu diantara dua opsi tersebut, maka negara sebagai aktor rasional, akan memilih opsi yang paling menguntungkan atau memilih opsi dengan resiko kerugian yang paling minimal. Negara sebagai aktor yang rasional, sebelum memutuskan dan bertindak, akan selalu memperhitungkan kerugian dan keuntungan yang terjadi apabila suatu tindakan diambil.

Teori model aktor rasional oleh Allison disebut sebagai model klasik dalam pembuatan kebijakan. Karena model ini mengasumsikan pembuat keputusan sebagai suatu individu yang dapat berpikir rasional untuk kepentingan nasional. Dimana ia akan bertindak rasional atau memaksimalkan kemampuannya untuk mencapai tujuan. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Analisis model pembuatan keputusan ini adalah pilihan – pilihan yang di ambil oleh pemerintah (Union County College , 2013).

Dalam kasus ini, Amerika Serikat dihadapkan pada kondisi dilematis, apakah memutuskan untuk menggunakan strategi *hard power* dengan menginvasi Suriah, atau menggunakan strategi *soft power* dengan mengutamakan negosiasi di atas meja perundingan dengan pihak Suriah. Sebagai aktor rasional, Amerika Serikat akan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang diperoleh apabila salah satu dari dua opsi / alternatif tersebut dijalankan.

Hard power beresiko merugikan Amerika Serikat baik dari segi ekonomi maupun politik. Kerugian dari segi ekonomi yang beresiko akan ditanggung Amerika Serikat apabila strategi *hard power* digunakan yakni berupa membengkaknya biaya yang akan dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Perang membutuhkan biaya yang sangat besar. Pada Perang Afghanistan maupun Irak, Harvard University's Kennedy School of Government mencatat bahwa Amerika Serikat telah mengeluarkan biaya hingga USD 6 Triliun (Global Research, 2015). Angka tersebut termasuk biaya peralatan militer, logistik, biaya personel pasukan serta biaya perawatan jangka panjang dan kompensasi disabilitas terhadap veteran perang beserta keluarga (Time News, 2014). Besarnya biaya perang tersebut bahkan beresiko menjadi lebih besar lagi apabila Amerika Serikat memutuskan untuk menggunakan strategi *hard power* dalam konflik internal Suriah ini, mengingat konflik Suriah melibatkan multi aktor yang begitu beragam dan sulit untuk diatasi.

Tak hanya itu, penggunaan strategi *hard power* juga beresiko menyebabkan tingginya korban jiwa yang berjatuh dari pihak Amerika Serikat mengingat pada perang sebelumnya baik di Irak maupun di Afghanistan, pasukan Amerika Serikat yang menjadi korban jiwa mencapai angka hingga ribuan jiwa.

Pada Perang Irak, Department of Defense Amerika Serikat mencatat 4.425 pasukan Amerika Serikat meninggal dunia, 32.223 lainnya terluka, 725 pasukan mengalami amputasi, dan 360.000 veteran perang mengalami *brain traumatic syndrome* (Global Security, 2014). Sedangkan pada Perang Afghanistan, sebanyak 2.326 pasukan Amerika Serikat meninggal dunia dan 20.083 lainnya terluka (iCasualties, 2015). Bahkan dalam keterlibatan Amerika Serikat pada Perang Vietnam beberapa tahun silam, tercatat korban jiwa dari pihak Amerika Serikat yang meninggal dunia mencapai angka hingga 58.178 jiwa (Military Factory, 2014).

Sehubungan dengan hal tersebut, konflik internal Suriah merupakan konflik berkepanjangan yang sulit untuk terselesaikan. Cukup sulit untuk memprediksi kapan konflik akan berakhir. Penggunaan *hard power* untuk menghadapi target yang besar dalam konflik yang meluas dan berkepanjangan dalam waktu yang lama beresiko tinggi merugikan Amerika Serikat dalam segi politik. Dalam konflik tersebut telah muncul semakin banyak aktor dan faksi politik. Semakin bertambahnya jumlah faksi politik di Suriah menyebabkan semakin tidak jelasnya musuh bagi Amerika Serikat dimana hal tersebut sangat beresiko membahayakan jaminan kepentingan nasional Amerika Serikat di Suriah. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan angka pertumbuhan kubu – kubu oposisi dan kelompok – kelompok baru pendukung pemerintah yang menyebabkan munculnya semakin banyak aktor yang terlibat dalam konflik tersebut.

Beberapa kubu – kubu utama di Suriah yakni *Syrian Army*, *Free Syrian Army*, *Islamic Front*, *Jabhat Al Nusra* yang terhubung dengan *Al Qaeda*,

Hizbullah, Kurdi serta *Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL)* (ABC News, 2014). Kubu – kubu tersebut masing – masing menguasai daerah territorial tertentu di Suriah. Konflik berkepanjangan di Suriah juga menyebabkan hadirnya berbagai pejuang eksternal yang sebagian besar diantaranya merupakan kelompok radikal islam. Meningkatnya jumlah aktor yang terlibat dalam konflik internal Suriah menyebabkan semakin tidak jelasnya musuh bagi Amerika Serikat, sehingga bagi Amerika Serikat, posisi lawan dan kawan merupakan sesuatu yang dilematis mengingat adanya keterlibatan multiaktor di Suriah yang berbasis atas kepentingan kelompok masing – masing.

Selain itu, terkait kerugian dari segi politik, Amerika Serikat juga beresiko mendapat kecaman dan kritik dari dunia internasional terutama kelompok kemanusiaan apabila melakukan invasi militer karena upaya *hard power* tersebut justru bertentangan dengan image yang selama ini dibawa oleh Amerika Serikat yakni “*peace*” dan “*demokrasi*” terlebih dalam kasus ini proposal Amerika Serikat untuk menginvasi Suriah telah ditentang oleh Prancis maupun Inggris sebagai sekutu terdekat Amerika Serikat. Dalam internal Amerika Serikat sendiri, upaya invasi militer terhadap Suriah juga tak mendapat autorisasi dari kongres maupun masyarakat sehingga tak ada legitimasi bagi Amerika Serikat untuk menggunakan *hard power* sebagai strategi diplomasinya. Strategi *hard power* justru dapat merugikan pemerintah Amerika Serikat dengan adanya indikasi hilangnya kepercayaan publik Amerika Serikat apabila pemerintah tetap mengedepankan strategi *hard power*.

Sedangkan strategi diplomasi *soft power* melalui jalur perundingan dan negosiasi dianggap sebagai strategi yang lebih menguntungkan. Keuntungan *soft*

power berupa : Amerika Serikat dapat menghemat *cost* dan anggaran militer yang beresiko membengkak apabila perang terjadi serta dapat menghindari jatuhnya korban jiwa dari pihak Amerika Serikat. Terlebih, ancaman terhadap jaminan kepentingan nasional Amerika Serikat di Suriah dapat dihindari, mengingat keterlibatan multiaktor di Suriah menyebabkan semakin tidak jelasnya musuh bagi Amerika Serikat. Selain itu, Amerika Serikat juga dapat memperoleh dukungan dari dalam negeri termasuk masyarakat AS maupun kongres, bahkan dunia internasional karena keputusan Amerika Serikat yang lebih mengedepankan *peacefull means* daripada pendekatan koersif. Secara singkat, perbandingan keuntungan *soft power* dan kerugian *hard power* dapat di lihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Perbandingan *Hard Power* Dan *Soft Power*

Strategi Diplomasi	Kalkulasi Untung Rugi Ekonomi	Kalkulasi Untung Rugi Politik
<i>Hard Power</i>	<i>High Cost</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya dukungan dari internal AS 2. Kecaman dunia internasional 3. Kaburnya posisi lawan di Suriah
<i>Soft Power</i>	<i>Low Cost</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Besarnya dukungan dari internal AS 2. Memperoleh simpati dan dukungan dunia internasional

E. Hipotesa

Amerika Serikat mengubah strategi diplomasi dari *hard power* menjadi *soft power* terhadap konflik internal Suriah pada tahun 2013 – 2014 karena adanya pilihan rasional bahwa strategi diplomasi *soft power* lebih menguntungkan dilihat dari :

1. Kalkulasi untung rugi ekonomi : Amerika Serikat dapat menghindari besarnya biaya yang akan dikeluarkan dalam perang dan menghindari jatuhnya korban jiwa dari pihak Amerika Serikat.
2. Kalkulasi untung rugi politik : Amerika Serikat dapat menghindari kecemasan dari internalnya sekaligus memperoleh simpati dan dukungan dunia internasional.

F. Metode Penelitian

1. Jangkauan Penelitian

Penulis membatasi penelitian skripsi ini pada kisaran tahun 2013 hingga tahun 2014. Tahun 2013 dipilih sebagai awal penelitian karena tahun tersebut merupakan momentum penting keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik internal Suriah, konflik di Suriah pada dasarnya telah memanans sejak 2011 silam. Momentum penting keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik internal Suriah ditandai dengan dilakukannya serangkaian upaya diplomasi dalam bentuk *hard power*. Sedangkan tahun 2014 dipilih sebagai batas akhir penelitian karena pada tahun tersebut terjadi titik balik perubahan strategi diplomasi yang digunakan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat mengubah strategi diplomasinya dari *hard power* menjadi *soft power*. Hal ini juga menandakan bahwa tahun 2014 merupakan masa akhir diterapkannya strategi *hard power* oleh Amerika Serikat dalam Konflik Internal Suriah.

Kemudian, konflik internal yang terjadi di Suriah dipilih sebagai fokus penelitian karena strategi yang diterapkan Amerika Serikat dalam konflik di wilayah Suriah ini sangat berbeda dengan strategi yang diterapkan AS sebelumnya pada negara – negara konflik lainnya seperti yang dilakukan terhadap Irak maupun Afghanistan, dimana Amerika Serikat cenderung menggunakan *hard power* tanpa melakukan perubahan strategi ke arah *soft power*. Perubahan strategi dari *hard power* menuju *soft power* tersebut merupakan hal yang terhitung jarang dilakukan oleh Amerika Serikat, namun dalam keterlibatannya pada konflik internal di Suriah ini, Amerika Serikat justru melakukan perubahan strategi diplomasi melalui *hard power* menjadi *soft power* dalam kurun waktu yang cukup singkat, yakni 2013 hingga 2014. Oleh karena itu, perubahan strategi diplomasi yang dilakukan Amerika Serikat dalam konflik internal Suriah pada tahun 2013 hingga 2014 diambil sebagai batasan penelitian dan fokus Penulis dalam skripsi ini.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kualitatif yang didasarkan pada penelitian kepustakaan (*Library Research*) dimana data – data yang diperoleh merupakan data sekunder yang diambil dari berbagai sumber yakni :

- a. Buku – buku ilmiah atau hasil penelitian
- b. Dokumen – dokumen
- c. Jurnal, Majalah, Surat Kabar, Internet dan media lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deduktif dimana digunakan beberapa teori terlebih dahulu lalu kemudian data dan fakta dikumpulkan sebagai bahan untuk menganalisis relasi dan keterkaitan antara teori dengan data dan fakta terkait secara sistematis.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teoritik, hipotesa, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini, penulis akan membahas tentang politik luar negeri dan diplomasi Amerika Serikat yang meliputi dasar *foreign policy* Amerika Serikat, kebijakan luar negeri Amerika Serikat di suriah selama beberapa periode, termasuk hubungannya dengan rezim Suriah.

BAB III : Dalam bab ini akan dibahas tentang perubahan strategi diplomasi Amerika Serikat dari *hard power* menjadi *soft power* serta membahas tentang fenomena konflik di Suriah termasuk penyebab, dinamika, dan aktor yang terlibat dalam konflik.

BAB IV : Bab ini membahas tentang penyebab Amerika Serikat mengubah strategi diplomasinya dari *hard power* menjadi *soft power* dalam konflik internal Suriah.

BAB V : Bab ini akan berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan kajian pada bab – bab sebelumnya.